

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistic, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Djulius, 2018;16).

Nurwati (2008) menyatakan bahwa kemiskinan yakni permasalahan sosial yang terjadi kehidupan masyarakat. Permasalahan ini sudah sangat lama serta berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, dimana tidak berbeda dengan usia

manusia itu sendiri, dan unsur pokok masalahnya berhubungan dengan bermacam karakter atau bentuk kehidupan manusia. Artinya, bahwa kemiskinan tersebut adalah permasalahan kehidupan yang bersifat mendunia atau global, dimana memiliki arti bahwa permasalahan kemiskinan telah menjadi perhatian dunia, serta permasalahan ini dialami seluruh negara, meskipun dampaknya tidak sama. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang bersifat multidimensional. Pendekatan yang dilakukan dengan satu bidang ilmu tertentu belum cukup untuk menjelaskan fenomena dan makna yang mengikutinya. Secara umum pengertian yang kerap dipakai dalam kajian akademik dan perhitungan yakni pengertian kemiskinan dari Bank Dunia yakni kegagalan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum (World Bank, 1990). Definisi kemiskinan hingga kini sudah meluas, sebab faktor penyebabnya, permasalahan serta indikator yang melingkupinya semakin kompleks. Kemiskinan bukan sebatas dirasa sebagai dimensi ekonomi namun juga sudah menyentuh dimensi politik, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Kemiskinan juga dapat dikatakan dengan suatu keadaan seseorang ketika tidak mampu guna mencukupi kebutuhan pakaian, perumahan, dan pangan, pendidikan dan keahlian yang rendah, rendahnya tingkat pendapatan, dan keterkucilan sosial sebab keterbatasan kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas sosial masyarakat. Secara singkat, kemiskinan ialah rendahnya sebuah standar kehidupan yakni sebuah tingkat kekurangan dalam materi pada segolongan atau sejumlah orang dibanding standar kehidupan yang berlaku secara umum dalam

masyarakat tersebut (Suparlan dalam Dewi, 2011). Bappenas (dalam Diah, 2007) memberikan definisi dari kemiskinan yakni sebuah keadaan apabila sekelompok orang atau seseorang, perempuan atau laki-laki tidak dapat memenuhi hak dasarnya dalam mengembangkan serta mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat meliputi, rasa aman dari ancaman atau perbuatan tindak kekerasan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pertanahan, air bersih, perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, serta hak untuk terlibat dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Todaro dan Smith (2003), kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan akibat dari interaksi antara: (1) Tingkat pendapatan nasional negara berkembang yang terbilang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang lambat; (2) Pendapatan per kapita masih rendah dan lambatnya pertumbuhan; (3) Ketimpangan distribusi pendapatan; (4) Mayoritas penduduk di negara Dunia Ketiga harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut; (5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah; (6) Fasilitas Pendidikan maupun kurikulum yang kurang relevan dan kurang memadai.

2.1.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan

Arsyad (2010) dalam Ayu (2012) mengelompokkan jenis kemiskinan, menjadi:

- a. Kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang diukur dengan membandingkan pendapatan individu dengan besarnya tingkat pendapatan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan sosial maupun kebutuhan pokok/dasar. Seseorang dapat dikatakan miskin apabila pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan (GK), dengan kata lain pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan yang tidak merata di suatu lingkungan. Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan berdasarkan lingkungan sekitarnya. Apabila seseorang dengan Rp6.000.000 tinggal di wilayah dengan lingkungan yang berpendapatan rata-rata Rp20.000.000, maka orang tersebut dapat dikatakan kurang mampu. Sebaliknya, apabila orang tersebut tinggal di wilayah dengan lingkungan yang berpendapatan Rp1.500.000 maka orang tersebut dapat dikatakan mampu.
- c. Kemiskinan kultural, yakni disebabkan oleh budaya atau sikap orang itu sendiri, seperti pemalas, tidak kreatif,, hanya mengandalkan dan mengharapkan bantuan orang lain tanpa berusaha, boros.
- d. Kemiskinan struktural, yakni disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya bagi suatu golongan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia bagi

mereka. Hal ini biasanya terjadi akibat dari kebijakan pemerintah yang keliru maupun belum merata.

2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan

Suwadi (2014:25) memaparkan, kemiskinan dikarenakan sifat alami, sifat yang muncul dari perilaku seseorang atau masyarakat, yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya modal atau dapat diartikan kurang memadainya kualitas sumber daya manusia misal dari segi pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan.
- b. Tempat atau letak geografis sebuah daerah yang terpencil serta susah dijangkau, dimana memicu sulitnya melakukan interaksi bersama penduduk yang lebih maju.

Kedua, kemiskinan sebab kebijakan pemerintah atau kebijakan pembangunan, aspeknya meliputi:

- a. Kurang memperhatikan usaha mikro ekonomi atau produk atau usaha masyarakat yang berskala kecil.
- b. Terdapatnya kesenjangan antara pembangunan di kota dan desa.
- c. Pembangunan yang kurang memperhatikan wilayah atau kawasan yang sulit dijangkau dan terpencil.

2.1.1.4 Indikator Ukuran Kemiskinan

Sayogyo (dalam Suwadi 2014:27) memaparkan teori dari Lincoln Arsyad yang mengungkapkan bahwa kemiskinan bisa diukur dengan:

1. Indikator Tingkat Konsumsi Beras

Mengukur banyaknya taraf konsumsi beras per kapita per tahunnya, dengan mencakup tiga kategori miskin yakni nyaris miskin, miskin, dan sangat miskin.

2. Indikator Tingkat Pendapatan

Pengukurannya dilihat dari pendapatan perkapita serta pengeluaran per harinya. Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan indikator-indikator kemiskinan yakni:

- a. Ketidakmampuan untuk mencukupi konsumsi dasar seperti papan, pangan, dan sandang.
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha disebabkan cacat mental atau cacat fisik.
- c. Tidak mempunyai akses dalam mata pencaharian dan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan.
- d. Minimnya apresiasi dalam aktivitas sosial masyarakat.
- e. Terbatasnya sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.
- f. Kerentanan pada guncangan yang sifatnya massa maupun individual.
- g. Tidak memiliki jaminan masa depan (asuransi dan/atau investasi)
- h. Tidak terdapatnya akses akan kebutuhan hidup dasar semacam

transportasi, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1996, konsep indeks pembangunan manusia (IPM) pertama kali dikemukakan dan dipublikasi oleh UNP (*United Nations Development Programme*) melalui *Human Development Report* (HDR). Konsep IPM ini kemudian berlanjut dan berkembang setiap tahunnya. Pembangunan manusia yakni proses memperluas pilihan masyarakat untuk meningkatkan aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ialah indikator komposit tunggal dimana dimanfaatkan guna mengukur pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di sebuah wilayah. Terdapat (4) empat pilar pokok dalam pembangunan manusia, yakni pemberdayaan, keberlanjutan, pemerataan, dan produktivitas. (Kahang *et al* : 2016). Adapun kata kunci konsep pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik (BPS:2009) yakni:

- a. Pembangunan manusia yakni proses yang memiliki tujuan guna meningkatkan pilihan terutama dalam perolehan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kinerja pembangunan manusia secara kompleks dibentuk oleh tiga hal yakni sehat dan umur panjang; pengetahuan yang cukup dan kehidupan yang layak.
- b. Pembangunan manusia ditujukan guna membentuk lingkungan yang baik untuk masyarakat supaya bisa menjalankan produktivitas kehidupan dengan

baik, sehat, dan menikmati umur yang panjang.

- c. Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan hidup bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, manusia diposisikan sebagai subjek dan motor penggerak pembangunan nasional, sehingga diarahkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Masyarakat yang terlibat akan digerakan secara agregatif untuk memberikan kontribusi nyata dalam proses pembangunan sehingga pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama yang manfaatnya akan dirasakan bersama dan merata serta adil bagi masyarakat itu sendiri (Malik : 2014).

2.1.2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Tiga dimensi dasar pembentuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yakni meliputi:

- a. Umur Panjang dan Hidup Sehat

Usia hidup diukur dengan usia harapan hidup dimana perhitungannya dengan metode Brass, varian Trussel berdasar variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

- b. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah serta perhitungan rata-rata lama sekolah berdasar data dari Susenas Kor. Harapan lama sekolah didefenisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

dirasakan anak pada suatu umur di masa mendatang. Sementara perhitungan untuk indikator rata-rata lama memanfaatkan variabel kelas/tingkat yang sedang/pernah dijalani serta jenjang pendidikan paling tinggi yang telah diselesaikan.

c. Standar Hidup Layak

BPS menghitung standar hidup layak diukur dengan rata-rata konsumsi *riil* yang telah disesuaikan dengan formula Atkinson. Sedangkan *United Nations Development Programme* (UNDP) memanfaatkan indikator PDB per kapita *riil* yang disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*).

Diawal laporan tahun pertama, UNDP melakukan pengukuran kesehatan dengan memakai angka harapan hidup waktu lahir. Berikutnya pengukuran dimensi pengetahuan memanaatkan angka melek huruf. Terakhir dipakai indikator PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita untuk mengukur dimensi standar hidup yang layak.

2.1.2.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Manfaat utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masyarakat (Badan Pusat Statistik : 2015) adalah:

- a. IPM adalah indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya dalam membangun kualitas hidup penduduk atau masyarakat.
- b. IPM digunakan untuk menentukan level pembangunan suatu negara ataupun wilayah.

- c. IPM ialah data strategis dalam menilai kinerja pemerintahan, serta dimanfaatkan menjadi alokator penentuan DAU (dana alokasi umum).

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2.1.3.1 Pengertian TPAK

Angkatan kerja ialah penduduk yang berada pada usia kerja yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja (cuti, sakit, dsb), maupun pengangguran. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) memperlihatkan sebuah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang secara aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja baik yang tengah mencari pekerjaan maupun yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bisa dinyatakan untuk semua tenaga kerja yang tersedia atau jumlah tenaga kerja berdasarkan suatu kelompok desa-kota, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin (Kusnesndi, 2009:6). Sedangkan Payman J.Simanjatak (2001) memaparkan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yakni suatu kelompok penduduk di mana bisa dihitung dengan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Menurut Mulyadi (2003:60), TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) memperlihatkan jumlah angkatan kerja dalam sebuah kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Umur yang dimaksud yaitu usia 15 hingga 64 yang berpotensi untuk memproduksi jasa dan barang (Sukirno, 2004:18). Singkatnya, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) tidak

berbeda dengan jumlah angkatan tenaga kerja dibagi jumlah tenaga kerja dalam kelompok yang sama.

2.1.3.2 Konsep Ketenagakerjaan

Konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum, meliputi (Nainggolon, 2009):

- a. *Manpower* (tenaga kerja) atau penduduk usia kerja (UK)

Tenaga kerja yakni penduduk usia kerja (usia lebih dari 15 tahun) atau total penduduk dalam sebuah negara yang bisa memproduksi jasa dan barang apabila terdapat permintaan terhadap tenaga mereka, serta apabila mereka bersedia berpartisipasi dalam kegiatan itu.

- b. *Labor force* (Angkatan Kerja)

Angkatan kerja yakni bagian dari tenaga kerja yang berusaha untuk terlibat atau sesungguhnya terlibat dalam aktivitas produksi jasa dan barang, maka yang dimaksud angkatan kerja ialah penduduk yang memiliki aktivitas pokok selama seminggu yang lalu bekerja (K) serta penduduk yang tengah mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja yang masuk kategori bekerja jika minimum bekerja selama satu minggu adalah 1 jam untuk aktivitas produktif sebelum dilakukannya pencacahan. Mencari pekerjaan yakni individu yang memiliki aktivitas utama tengah mencari pekerjaan, atau sementara dengan mencari pekerjaan serta selama satu minggu yang lalu belum bekerja minimal 1 jam. Untuk menghitung Angkatan Kerja,

digunakan rumus sebagai berikut:

$$AK = K + MP$$

Penjumlahan angka angkatan kerja umumnya dinamakan dengan *labor supply* (penawaran angkatan kerja). Sementara penduduk sebagai tenaga kerja atau pekerja dinamakan *labor demand* (permintaan angkatan kerja).

c. Bukan Angkatan Kerja (*unlabor force*)

Bukan angkatan kerja yakni penduduk yang memiliki usia lebih dari 15 tahun akan tetapi aktivitas utamanya selama satu minggu yang lalu ialah mengurus rumah tangga, sekolah, serta sebagainya. Jika individu yang sekolah, mereka bekerja selama satu minggu yang lalu minimal 1 jam, akan tetapi aktivitas utamanya ialah sekolah, maka ia tetap tergolong bukan angkatan kerja. Terdapat beberapa yang lain yang termasuk dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau tidak dalam kelompok BAK (bukan angkatan kerja). Jumlah usia kerja berdasarkan identitas, memanfaatkan rumus di bawah ini:

$$UK = AK + BAK$$

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labor force participation rate*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memperlihatkan jumlah angkatan kerja dalam sebuah kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur itu, yaitu melalui melakukan perbandingan antara

angkatan kerja dengan tenaga kerja. Perhitungan TPAK memanfaatkan rumus di bawah ini:

$$\text{TPAK} = \text{AK/UK} \times 100\%$$

e. Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*)

Tingkat pengangguran yakni angka yang memperlihatkan banyaknya jumlah angkatan kerja yang tengah aktif mencari pekerjaan, yakni melakukan perbandingan terhadap jumlah orang yang menacari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Rumus untuk perhitungan TP (Tingkat Pengangguran), yakni:

$$\text{TP} = \text{MP/AK} \times 100\%$$

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi TPAK

Berikut beberapa faktor yang memengaruhi besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sesuai pemaparan dari Sony (2003), yaitu:

a. Jumlah Penduduk Bersekolah

Jumlah penduduk yang bersekolah yang semakin besar, maka akan menjadikan jumlah angkatan kerja semakin kecil serta TPAK juga akan semakin kecil. Kondisi tersebut dipengaruhi tingkat penghasilan keluarga dan tingkat penyediaan fasilitas pendidikan.

b. Umur Penduduk

Penduduk dengan umur yang muda secara umum belum memiliki tanggung yang besar sebagai pencari nafkah, serta mereka juga secara umum masih

bersekolah.. Penduduk berumur 22 hingga 55 tahun, khususnya laki-laki biasanya dituntut untuk mencari nafkah, oleh karenanya TPAKnya relatif besar. Sementara penduduk dengan usia melebihi 55 tahun, sudah menurun kemampuan bekerjanya, serta TPAKnya relatif rendah.

c. Jumlah Penduduk Mengurus Rumah Tangga

Dalam suatu keluarga, biasanya ditentukan siapa bekerja, mengurus rumah tangga, dan bersekolah. Bertambah banyaknya anggota keluarga yang mengurus rumah tangga, akan menjadikan TPAK semakin kecil.

d. Tingkat Upah

Bertambah tingginya tingkat upah dalam masyarakat, bertambah banyak anggota keluarga yang tertarik masuk industri (bekerja), oleh karenanya akan bertambah tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

e. Tingkat Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga

Keluarga berpendapatan bahwa besar relatif terhadap biaya hidup sehari-hari cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja. Kebalikannya, keluarga dengan biaya hidup sangat besar relatif kepada penghasilnya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga bekerja. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

f. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi, menjadikan waktu yang

disediakan untuk bekerja juga semakin banyak. Khususnya untuk wanita, dengan tingginya pendidikan maka semakin besar kecenderungan untuk bekerja.

g. Kegiatan Ekonomi

Program pembangunan di satu sisi memaksa keterlibatan lebih banyak orang, di lain sisi, program pembangunan menumbuhkan berbagai harapan baru. Harapan agar bisa ikut menikmati hasil pembangunan itu dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Sehingga, kegiatan ekonomi yang semakin bertambah, maka semakin besar TPAK.

2.1.4 Inflasi

2.1.4.1 Pengertian Inflasi

Inflasi yakni kenaikan likuiditas atau kenaikan jumlah uang dalam perekonomian. Definisi ini mengacu terhadap gejala umum yang diakibatkan dari kenaikan jumlah edaran uang dimana diduga sudah memicu kenaikan berbagai harga. Inflasi juga diartikan sebagai peningkatan harga secara umum dalam perekonomian dimana berlangsung dengan terus-menerus. (Supriyanto, 2007:171). Sementara itu, Boediono (2001:161), menuturkan bahwa inflasi yakni naiknya tingkat harga-harga secara umum serta berkelanjutan. Kenaikan harga bisa disebut inflasi apabila peningkatan harga suatu barang mempengaruhi dan menyebabkan peningkatan harga-harga barang lain. Lawan dari inflasi dinamakan deflasi (www.bi.go.id).

Guna memahami inflasi lebih lanjut, ada terori-teori inflasi, di antaranya ialah teori strukturalis. Teori ini lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika Latin. Teori ini menjelaskan, bahwa inflasi khususnya di negara berkembang cenderung dipicu berbagai faktor struktural dalam perekonomian. Teori strukturalis memaparkan, ada dua permasalahan struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang bisa memicu inflasi. Pertama, tidak elastisnya penerimaan ekspor, yakni lebih lambatnya pertumbuhan nilai ekspor daripada pertumbuhan sektor yang lain. Kondisi ini dikarenakan memburuknya *terms of trade* serta kurang responsifnya produksi barang ekspor terhadap kenaikan harga. Permasalahan lainnya yakni tidak elastisnya produksi bahan makanan dalam negeri yakni pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak cepat seperti penambahan penduduk serta meningkat lebih tingginya pendapatan perkapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung mengalami peningkatan dibanding kenaikan harga barang yang lain. Kondisi tersebut memicu tuntutan kenaikan upah dari pekerja di sektor industri yang dapat menjadikan naiknya biaya produksi serta pada akhirnya dapat memicu inflasi. (Kebanksentralan seri inflasi,2009:10-11).

2.1.4.2 Penggolongan Inflasi

Penggolongan inflasi sesuai pemaparan dari Supriyanto 92007:172), yakni:

- a. Inflasi berdasarkan tingkatannya

Inflasi ini mencakup inflasi berat yakni berkisar 30 hingga 100% setahun,

inflasi sedang yakni berkisar 10 hingga 30% setahun, dan inflasi ringan yakni di bawah 10% setahun. Adapun yang disebut dengan inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi yakni melebihi 100% dalam setahun.

b. Inflasi berdasarkan sebab-sebabnya

Inflasi ini meliputi *demand inflation* yakni inflasi yang muncul sebab permintaan masyarakat akan jasa dan barang yang tinggi. Peningkatan ini dikarenakan hal-hal semacam meningkatnya pengeluaran investasi swasta sebab kredit yang murah, kenaikan permintaan ekspor, serta bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang. Kedua, *cost inflation* yakni terjadinya inflasi sebab biaya produksi yang naik. Terjadinya *cost inflation* yakni apabila naiknya biaya produksi, contohnya dikarenakan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak).

c. Inflasi berdasarkan tempat asalnya

Inflasi ini digolongkan menjadi *imported inflation* dan *domestic inflation*. Inflasi yang asalnya dari dalam negeri muncul sebab adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru serta gagalnya pasar dimana berdampak mahalny harga bahan makanan. *Imported inflation* (Inflasi berasal dari luar negeri) yakni inflasi yang timbul sebagai konsekuensi dari kenaikan harga barang impor. Kondisi tersebut terjadi karena kenaikan tarif impor barang atau tingginya biaya produksi barang di luar negeri.

2.1.4.3 Faktor-faktor Penyebab terjadinya Inflasi

Inflasi yakni sebuah permasalahan ekonomi yang cukup meresahkan terutama untuk negara berkembang. Penyebab utama terjadi inflasi salah satunya ialah defisit anggaran belanja pemerintah dimana selanjutnya memiliki dampak terhadap peningkatan jumlah uang beredar. Menurut Suseno dan Atsiyah (2009:11-17), inflasi bisa dipicu dari sisi penawaran, sisi permintaan, sisi gabungan penawaran dan permintaan, ataupun sisi ekspektasi. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

a. Inflasi akibat Faktor Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini terjadi sebab terdapatnya pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Jumlah uang beredar yang meningkat ini berdampak pada menurunnya suku bunga sehingga investasi dan jumlah konsumsi mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi berarti permintaan mengalami peningkatan. Terdapatnya peningkatan permintaan akan bisa memicu peningkatan harga secara keseluruhan. Kondisi ini dinamakan *demand pull inflation*.

b. Inflasi Penawaran (*Cost Push Inflation/Supply Shock Inflation*)

Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan biaya produksi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Kenaikan biaya ini akan meningkatkan harga hasil produksi (*Cost Push Inflation*). Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu juga dapat menyebabkan permasalahan seperti gagal panen,

hambatan distribusi barang, maupun faktor-faktor yang timbul sebagai hasil dari kebijakan pemerintah seperti kebijakan tarif, pajak, dan pembatasan impor (*Supply Shock Inflation*).

c. Inflasi Campuran (*Mixed Inflation*)

Inflasi campuran yakni inflasi yang dipicu kenaikan penawaran dan kenaikan permintaan, perilaku permintaan terhadap barang dan jasa bertambah atau permintaan dan penawaran tidak seimbang. Kondisi ini menjadikan menurunnya faktor produksi dan persediaan barang. Sedangkan, barang substitusi terbatas atau bahkan tidak ada. Kondisi ini akhirnya bisa menjadikan harga-harga menjadi lebih tinggi.

d. Inflasi Ekspektasi (*Expected Inflation*)

Inflasi dapat disebabkan oleh terdapatnya inflasi ekspektasi atau ekspektasi para pelaku ekonomi (Gordon,2007:15). Inflasi ekspektasi yakni inflasi yang timbul dikarenakan perilaku masyarakat yang *forward looking* atau bersifat adatif. Masyarakat menilai jika di masa depan keadaan ekonomi akan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Harapan ini bisa menjadikan adanya *cost push inflation* maupun *demand pull inflation*, bergantung dari bagaimana harapan masyarakat, faktor produksi, dan kondisi persediaan barang di saat sekarang dan masa mendatang.

2.1.4.4 Pengendalian Inflasi

Inflasi yakni gejala ekonomi yang bisa berdampak negatif pada aktivitas perekonomian baik di negara berkembang maupun negara maju. Oleh karenanya, tiap negara berupaya mengontrol laju inflasi pada suatu tingkat. Terkait upaya pengendalian ini, dibutuhkan koordinasi antara kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dan kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal.

Peranan bank Indonesia sebagai bank sentral yakni sebagai mitra strategis serta penyeimbang bagi otoritas fiskal dalam mempertahankan stabilitas ekonomi makro. Kebijakan Bank Indonesia sangat memberi pengaruh pada seluruh aktivitas perekonomian. Pelaksanaan kebijakan moneter ialah secara transparan, konsisten, berkelanjutan, serta harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah di sektor perekonomian.

Dalam melaksanakan serta menetapkan kebijakan moneter, Bank Indonesia mengacu pada ITF (*Inflation Targeting Framework*). Kerangka ini diaplikasikan sejak Juli 2005. Pelaksanaan kebijakn ini termuat dalam situs atau web resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) serta diterangkan dalam buku Kebanksentralan seri kebijakan moneter di Indonesia (Perry Warjiyo dan Solikin,2003:7) yakni sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter kontraktif, yakni sebuah kebijakan moneter guna menurunkan jumlah uang beredar.
- b. Kebijakan moneter ekspansif, yakni sebuah kebijakan moneter guna

memperbanyak jumlah uang beredar.

Pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia melalui beberapa instrumen di bawah ini:

a. Politik uang ketat (politik diskonto)

Kebijakan diskonto dilakukan oleh bank dengan menaikkan suku bunga kredit dengan tujuan guna menurunkan jumlah uang beredar. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan kredit masyarakat sehingga jumlah kredit yang diberikan pada masyarakat juga ikut berkurang sehingga tekanan inflasi akan berkurang.

b. Politik pasar terbuka

Politik pasar terbuka merupakan sebuah kontrol inflasi dimana dijalankan bank sentral melalui menjual surat berharga atau obligasi ke pasar modal yang bertujuan guna menekan perkembangan jumlah uang beredar dan menyerap uang dari masyarakat. Dengan begitu jumlah uang beredar akan berkurang serta menurunnya laju inflasi.

c. Peningkatan *cash-rasio*

Cara meningkatkan *cash-ratio* yakni lewat kebijakan persediaan kas, dimana besarnya kas cadangan yang diwajibkan Bank Indonesia pada bank umum bergantung kepada keputusan pemerintah atau Bank Indonesia. Peningkatan ini dijalankan dengan menaikkan perbandingan antara uang yang mengendap di dalam kas dengan jumlah uang beredar. Melalui upaya ini kemampuan bank umum untuk memberi kredit akan berkurang, dan pada akhirnya ikut berkurang juga jumlah uang

beredar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian, untuk melihat persamaan dan perbedaan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Berikut pemaparan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang peneliti angkat:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suripto Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM	Hasil dalam penelitian dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) Variabel Tingkat	Menggunakan variabel IPM sebagai variabel independent dan kemiskinan sebagai variabel dependent	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan variabel tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai

terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2010-2017.	Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan;		variabel independent .
Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. ISSN 2621-3842 Vol.1 No 2, 2020	(2) variabel pengganggu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan; (3) Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan;		• Tidak menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independent .
			• Penelitian dilakukan terhadap provinsi DIY.

		(4) Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan		
2.	Bambang Sujagad Susanto. Penyerapan Tenaga Kerja dan IPM terhadap Upah Minimum di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap UM memiliki pengaruh yang	Menggunakan Variabel IPM.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel penyerapan tenaga kerja sebagai variabel independent dan UPM sebagai dependent. • Tidak

	Jurnal of Management the Asia Pacific ISSN 2407-6325 Vol 1. No.1	negatif, sementara IPM berpengaruh positif.		menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independent <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan terhadap provinsi di Indonesia.
3.	Syaifullah Pengaruh IPM dan Penggguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal Untirta Vol.6	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh antara variabel IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan.	Menggunakan Variabel IPM sebagai variabel independent dan kemiskinan sebagai variabel dependent.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel pengguran sebagai variabel independent. • Tidak menggunakan variabel inflasi sebagai variabel

	<p>No 2 tahun 2016 ISSN:2089- 4473</p>	<p>Kemudian secara parsial, variabel IPM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap varabel kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan.</p>		<p>independent. • Penelitian dilakukan terhadap provinsi Aceh.</p>
--	--	---	--	---

4.	<p>Barika</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengganguan dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi se Sumatera. Jurnal JEEP Volume 05 Nomor 1</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera, sementara belanja pemerintah terbukti berpengaruh signifikan negatif dan Pengganguan berpengaruh positif signifikan</p>	<p>Menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independent dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah dan pengganguan sebagai variabel independent . • Penelitian dilakukan terhadap provinsi se sumatera
----	--	--	---	--

		terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera.		
5.	<p>Sussy Susanti</p> <p>Pengaruh PDRB, Pengangguran dan IPM terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan Analisis Data Panel.</p> <p>Jurnal Matematika</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Pengangguran dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel IPM sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan terhadap provinsi 	<p>Menggunakan variabel PDRB dan pengangguran sebagai variabel independent.</p>

	Integratif. Vol. 9 No 1 April 2013. ISSN 1412- 6184		Jawa Barat.	
6.	Desrinasi ningsih Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika Vol 2 No 1 April 2016.	Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dan pertumbuha n ekonomi tidak memberi pengaruh pada tingkat kemiskinan di Indonesia	Menggunakan variabel Inflasi sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent . • Penelitian dilakukan terhadap negara Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), tingkatpartisipasi angkatan kerja (TPAK) dan inflasi.

2.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk seluruh negara di berbagai belahan dunia. Indeks Pembangunan Manusia bisa menunjukkan seberapa besar kemajuan program pembangunan pemerintah dalam sebuah periode sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk periode selanjutnya. Indeks Pembangunan Manusia menerangkan bagaimana penduduk bisa mengakses hasil pembangunan semacam pendidikan, kesehatan, memperoleh pendapatan, serta lainnya (Sinaga, 2009). Pemerintah tentu mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (masyarakat) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Misalnya melalui program di bidang pendidikan maupun pelatihan khusus, kualitas sumber daya manusia akan meningkat melalui pengetahuan dan keterampilan karena bertambahnya pengetahuan orang tersebut. Peningkatan

keahlian dan keterampilan juga akan dapat menjadikan hasil produksi perusahaan meningkat, sebab tenaga kerja yang terampil cenderung bekerja dengan efisien. Dengan kata lain, orang yang bisa memproduksi atau aktif bekerja, akan bisa mempunyai pendapatan dan akan mendorong tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dibuktikan dari peningkatan pendapatan atau konsumsi. Produktivitas kaum miskin yang rendah bisa dikarenakan rendahnya aksesnya untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, serta sebagainya (Sinaga, 2009).

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. (Kuncoro, 2006:67). Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktivitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menaik. Disisi lain, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan

pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan

TPAK yakni ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja dimana bisa menggambarkan dengan jelas hingga sejauh mana penduduk yang tergolong berusia kerja (lebih dari 15 tahun) yang sungguh-sungguh aktif maupun tidak aktif dalam bekerja. Menurut Sukirno (2004:18) angkatan kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang terdapat pada suatu perekonomian pada suatu tertentu. angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. TPAK termasuk sebuah faktor yang mempengaruhi *output* dalam aktivitas perekonomian, bertambah banyaknya penduduk yang produktif semakin tinggi pula jumlah output. Meningkatnya TPAK pada suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta taraf konsumsi yang kemudian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rendahnya TPAK menggambarkan kesempatan kerja untuk penduduk usia kerja semakin kecil serta kebalikannya semakin besarnya jumlah TPAK menggambarkan kesempatan kerja yang ada juga besar. Angkatan kerja merupakan modal untuk menggerakkan roda pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan terus berubah seiring dengan menjalankan proses demografi. Jumlah angkatan kerja yang naik diduga

adalah faktor yang positif yang bisa menstimulasi pertumbuhan perekonomian, dimana artinya bertambah banyaknya penduduk dapat meningkatkan pasar domestik, kecuali mereka memiliki daya beli sehingga akan meningkat permintaan (Todaro dalam Rasyadi, 2011).

2.3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Inflasi yang terjadi pada perekonomian disuatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaan berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (*hyper inflation*) maka perusahaan akan mengurangi jumlah *ouput* akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga

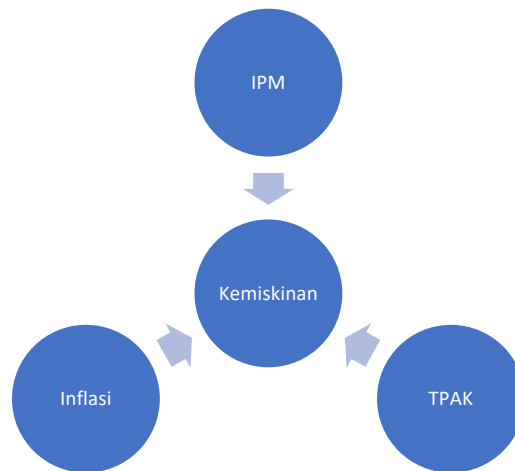
penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah (Nanga 2005:248).

Inflasi merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, inflasi akan menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang secara umum dan secara terus-menerus (Phutong dalam Yanti, 2009). Tentunya kenaikan inflasi ini jika dibiarkan akan menurunkan daya beli dan daya saing perekonomian. Salah satu akibat buruk dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran sebagian besar golongan masyarakat. Berbagai cara untuk menanggulangi inflasi dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya menaikkan suku bunga kebijakan (*policy rate*) atau kebijakan lain untuk mengelola terjadinya eksese likuiditas melalui pajak, giro wajib minimum, atau memberi disentif bagi pemodal jangka pendek. Adapun efek samping negatif dari kebijakan tersebut, yaitu ketidakseimbangan nilai tukar dan hambatan dalam ekspansi ekonomi.

Meningkatnya laju inflasi pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan. Hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua cara. Pertama, inflasi mengakibatkan nilai riil uang yang dipegang masyarakat akan menjadi menurun. Ketika harga meningkat, uang untuk membeli barang atau jasa menjadi lebih sedikit (daya beli menjadi turun). Kedua, inflasi mengakibatkan bunga *riil* yang diperoleh dari menyimpan uang di bank menjadi

turun sehingga daya beli masyarakat menjadi turun. Turunnya daya beli ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelumnya. Secara langsung, inflasi akan mempengaruhi kinerja, di sektor riil karena akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi (*cost production*) (Jundi, 2014). Meningkatnya biaya produksi akan dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dalam masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapat riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot yang disebabkan oleh kenaikan inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan (Sukirno, 2004). Inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap. Masyarakat yang memiliki pendapatan tetap (menengah ke bawah) tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti biasanya sehingga meningkatnya kemiskinan di masyarakat karena tingkat inflasi yang meningkat.

Berdasarkan pada pemapran kerangka pemikiran tersebut, dirumuskan paradigma penelitian terkait "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Jawa Barat 2014-2019" serta dinyatakan dalam paradigma penelitian, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terkait rumusan permasalahan penelitian, di mana rumusan permasalahan ini sudah dinyatakan berbentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono,2017:96). Hipotesis juga merupakan proposisi yang keberlakuannya akan diuji atau adalah dugaan sementara atas jawaban dari pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian ini, yakni:

1. Indeks pembangunan manusia (IPM) diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat (tahun 2014-2019)
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat (tahun 2014-2019).
3. Tingkat inflasi diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat (tahun 2014-2019).

4. Indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan inflasi diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2014-2019.